

Judul : Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian
Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3



Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, didampingi para kapolda seluruh Indonesia, mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR membahas kinerja Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam rapat kerja itu, salah satu fokus yang dibahas adalah penolakan Polri berada di bawah kementerian.

Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian

Semua fraksi partai politik di Komisi III DPR sepakat dengan sikap Kapolri bahwa institusi Polri harus tetap berada di bawah Presiden, bukan kementerian.

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Tidak hanya melemahkan institusi kepolisian, penempatan Polri di bawah kementerian juga akan melemahkan negara dan pada akhirnya melemahkan Presiden. Sikap itu pun mendapatkan dukungan dari sejumlah fraksi di Komisi III DPR yang menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden.

"Dalam hal ini, saya tegaskan di seluruh jajaran dan bapak bapak, saya menolak polisi di bawah kementerian. Kalau pun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," ujar Listyo dalam Rapat Kerja Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Wacana penempatan Polri di bawah kementerian sempat mengemuka pada akhir 2024. Saat itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Berbagai persoalan di internal Polri, terutama dugaan ketidaksihan dalam dinamika Pemilu 2024, menjadi salah satu alasannya.

Namun, wacana tersebut sebenarnya bukan hal baru. Pada 2014, Menteri Pertahanan saat itu, Ryamizard Ryacudu, pernah mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Pertahanan dan tidak lagi berada langsung di bawah Presiden. Usulan itu didasarkan pada pertimbangan efektivitas koordinasi dan untuk meringankan beban Presiden, tetapi tidak pernah diambil alih secara resmi oleh pemerintah dan akhirnya tidak berlanjut.

Terhakt wacana itu, Listyo mengungkapkan bahwa dirinya

pernah menerima sebuah pesan melalui aplikasi percakapan WhatsApp yang menanyakan kesediaannya jika ditawarkan menjadi menteri kepolisian. Namun, ia menegaskan menolak opsi tersebut. Bahkan, ia menyatakan lebih memilih meninggalkan jabatan.

Melemahkan negara

Menurut Listyo, penempatan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi kepolisian, melemahkan negara, dan pada akhirnya melemahkan Presiden. Posisi Polri saat ini sudah ideal karena memungkinkan institusi kepolisian menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban secara efektif sekaligus tetap berada langsung di bawah Presiden. Dengan struktur tersebut, Polri dapat bergerak cepat ketika dibutuhkan Presiden tanpa harus melalui kementerian.

"Ketika Presiden membutuhkan kami, kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau. Ini justru menimbulkan matahari kembar, menurut saya. Karena itu, kami tentu menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus," tuturnya.

Dalam paparannya, Listyo juga menegaskan, pascareformasi, Polri telah dipisahkan dari TNI. Polri tidak memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, serta mekanisme sekaligus mempersiapkan diri menuju *roadmap* sebagai *civilian police*.

Sikap tersebut, kata Listyo, sejalan dengan mandat Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945 yang menegaskan Polri sebagai alat negara

di bidang keamanan dan ketertiban serta merupakan bagian dari mandat reformasi 1998 yang menempatkan Polri langsung di bawah Presiden. Ia juga merujuk Ketetapan (TAP) MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan Polri berada di bawah Presiden.

"Pasal 7 Ayat 3 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 menyebutkan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR," ujarnya.

DPR sepakat

Seusai paparan Kapolri, perwakilan dari semua fraksi partai politik mendapat kesempatan berbicara. Tiap-tiap fraksi menyampaikan sikapnya secara bergantian dan semuanya menyatakan persetujuan agar kedudukan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Sikap tersebut kemudian disepakati sebagai keputusan rapat Komisi III DPR.

Dalam kesimpulannya, Komisi III menegaskan bahwa kedudukan Polri berada langsung di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian. Komisi III juga menegaskan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Isinya tadi sudah saya baca dan kami perlu tekankan bahwa rekomendasi DPR itu sifatnya mengikat. Tentu kami akan menindaklanjutinya," ujar Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman.

Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kopoksi) PDI-P di Komisi III DPR Safaruddin juga menyampaikan, reformasi Polri seharusnya difokuskan pada

perubahan kultur, bukan pada perubahan sistem kelembagaan atau kedudukan Polri. Menurut dia, Komisi III saat ini juga memiliki tim Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri yang mendorong langkah-langkah konkret agar perilaku aparat semakin mencerminkan prinsip melayani masyarakat.

"Masalah kultur ini yang penting, bukan perubahan sistem dan kedudukan Polri," ujarnya.

Safaruddin juga menegaskan pentingnya mekanisme pemilihan Kapolri melalui DPR sebagai bagian dari prinsip *checks and balances*. Ia mengingatkan, pada masa lalu pernah terjadi konflik internal di tubuh Polri hingga muncul dua pihak yang sama-sama mengklaim sebagai Kapolri, ketika proses pengangkatan tidak melalui DPR.

Menurut dia, konflik serupa tidak pernah terjadi lagi setelah mekanisme persetujuan DPR dijalankan. Karena itu, Fraksi PDI-P menyatakan mendukung mekanisme pemilihan Kapolri melalui Komisi III DPR serta mendukung Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian.

"Tidak di bawah menteri. Sudah langsung saja di (bawah) Bapak Presiden," tegasnya.

Machlud Arifin pun menyatakan dukungan agar Kapolri tetap berada langsung di bawah Presiden. Ia juga menyinggung kebutuhan penguatan anggaran Polri seiring tuntutan tugas ke depan.

Pemimpin rapat, Habiburrokhman, pun langsung menyantun dengan menyatakan Komisi III siap membahas penambahan anggaran. "Anggaran kita tambah nanti, aman," ujarnya. (DOW/DYT)